



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022
LAKIP**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU**

JL. MAYJEND. S. PARMAN NO 37 KOTA BENGKULU

RINGKASAN EKSEKUTIF

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan bidang Pendidikan, yang meliputi Pembinaan Pendidikan SMA, Pembinaan Pendidikan SMK, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Bidang Kebudayaan.

Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.094.320.931.936,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.117.897.015.630,00 atau sebesar 97,89 % Target Program dan Kegiatan. Berdasarkan data realisasi semua indikator sasaran dapat berjalan dan sesuai dengan target sasaran. Kebijakan refocusing menyebabkan beberapa indikator belum berjalan sesuai apa yang direncanakan, demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU,**

Drs. Eri Yulian Hidayat
NIP.19670725 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan selalu mengucapkan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022. sebagai perwujudan pelaksanaan Peningkatan Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2022.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022, dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi masukan bagi semua unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang akan datang.

Bengkulu, Januari 2023
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU,**

Drs. Eri Yulian Hidayat
NIP.19670725 199303 1 004

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ----- I

KATA PENGANTAR ----- II

DAFTAR ISI ----- IV

DAFTAR TABEL ----- V

BAB I PENDAHULUAN ----- 1

 A. Latar Belakang ----- 1

 B. Dasar Hukum ----- 2

 C. Gambaran Organisasi----- 3

 D. Sistematika Penulisan ----- 13

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

 A. Perencanaan Strategis ----- 14

 B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja----- 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

 A. Pencapaian Kinerja Sasasran ----- 27

 B. Akuntabilitas keuangan ----- 49

 C. Realisasi Anggaran ----- 49

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan ----- 54

 B. Saran - Saran----- 55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 . Indikator Kinerja Sasaran 1-----30

Tabel 3.2 . Indikator Kinerja Sasaran 2-----32

Tabel 3.3 . Indikator Kinerja Sasaran 3-----33

Tabel 3.4 . Indikator Kinerja Sasaran 4-----35

Tabel 3.5 . Indikator Kinerja Sasaran 5-----37

Tabel 3.6 . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi-----49

Tabel 3.7 . Pengelolaan Pendidikan -----50

Tabel 3.8 . Pengelolaan Kebudayaan -----51

Tabel 3.9 . Cabang Dinas-----51

Tabel 3.10 . UPTD-----53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan aspirasi masyarakat demi mencapai cita-cita bangsa dan Negara, syarat utama terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Government*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh, dengan menciptakan demokratisasi yang baik dan kondusif sehingga semakin tingginya semangat reformasi. Dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Government* yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang baik, tepat, jelas, terukur dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Pratik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemerintahan yang baik akan menghasilkan dampak yang baik terhadap laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas yang dimaksud merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan dasar tersebut, maka instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Government*. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

SAKIP menuntut adanya sinergisitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya dituangkan dalam laproan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang wajib disusun oleh instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Maka dari itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LAKIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam rangkai mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pebendaharaan Negara
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Cara Kerja Dinas Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967, tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN) 2005 - 2025
14. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- 16. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/2010 Nomor 95/PMK/07/2010 tentang Penyelarsan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun, tentang Pembagian Urusan pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016, tentang kedudukan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 22. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusun dan Penetapan

C. Gambaran Organisasi



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kelompok Fungsional
4. Bidang Pembinaan SMA
5. Bidang Pembinaan SMK
6. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (Luar Biasa)
7. Bidang Pembinaan Ketenagaan
8. Bidang Kebudayaan
9. UPTD
10. Cabang Dinas

1.1 Kepala Dinas

Kepala dinas **mempunyai tugas** melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Sedangkan fungsi kepala dinas adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai kewenangan dinas;
- c. penetapan tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kepala sekolah
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. pembinaan Cabang Dinas;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- j. pengarahan pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- k. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pendidikan dan kebudayaan

1.2 Sekretaris

Sekretaris **mempunyai tugas** pokok penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, pengkoordinasian, pengidentifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pelayanan informasi publik di bidang pendidikan dan kebudayaan
- e. pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
- f. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan keuangan

Mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang di berikan atasan.

Sedangkan Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seb Bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan.
- b. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi pengawaian.
- d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada dinas
- e. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah.

- f. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas.
- g. Pendekomendasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas.
- h. Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas.
- i. Pemutakhiran informasi publik di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- j. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- k. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- l. Pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas serta mengkoordinasikannya dengan kepada Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.
- m. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas.
- n. Pengelolaan anggaran Dinas.
- o. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas.
- p. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulangan, triwulan, semester dan tahunan.
- q. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan.
- r. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan.
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan, dan
- t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. pengkoordinasian kegiatan perencanaan Dinas;
- d. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas;

- e. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas;
- f. penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas;
- g. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
- h. mengikuti rapat teknis di bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan

3. Kepala Sub Bagaian Penyelenggaraan Tugas Perbantuan

Mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama memfasilitasi pengembangan karir pendidik, menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah pertama bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten /kota dan tugas tugas pembantuan lainnya.

Adapun fungsinya adalah

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub bagian penyelenggaraan tugas perbantuan, penyiapan bahan dan
- b. Data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub bagian penyelenggaraan tugas perbantuan
- c. Mengidentifikasi kebutuhan dan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan sekolah dasar dan sekolah pertama menengah, fasilitasi pengembangan karir pendidik sekolah dasar dan dan sekolah menengah pertama.
- d. Penyusunan standar rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama
- e. Mengikuti rapat teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai disposisi atasan
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian penyelenggaraan tugas perbantuan

- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian penyelenggaraan tugas perbantuan dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan

1.3 Bidang Pembinaan SMA

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas **mempunyai tugas** melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas **menyelenggarakan fungsi** :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- b. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- c. pengkoordinasian dan monitoring pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik, pengkoordinasian penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah atas;
- d. pemeriksaan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas.
- e. pemeriksaan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- f. pemeriksaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;
- i. pengevaluasian fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik;
- k. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah atas;

- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

1.4 Bidang Pembinaan SMK

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan **mempunyai tugas** menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan **menyelenggarakan fungsi** :

- a. penyusunan rencana program pelaksanaan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- d. pemeriksaan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- e. pemeriksaan bahan penelitian izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- f. pengkoordinasian dan monitoring pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- g. pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah;
- h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
- i. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana.
- l. prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- m. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- n. mengikuti rapat teknis di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan;

- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

1.5 Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus **mempunyai tugas** melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- b. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik pembangunan karakter pendidikan khusus;
- d. pelaksanaan monitoring pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- e. pengkoordinasian penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;
- f. pengkoordinasian penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
- g. pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- j. mengikuti rapat teknis di bidang pembinaan pendidikan khusus sesuai disposisi Kepala Dinas;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

1.6 Bidang Pembinaan Ketenagaan

Kepala bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan **memupnyai tugas** penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah serta sarana prasarana satuan pendidikan menengah atas, satuan pendidikan menengah kejuruan, dan satuan pendidikan khusus.

Bidang pembinaan ketenagaan **melaksanakan fungsi** sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan
- b. Perkoordinasian dalam penyiapan bahan bahan dan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan
- c. Pengkoodinasian Penyusunan bahan perumusan dan koodinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang PTK
- d. Pengkoodinasian Penyusunan bahan kebijakan di Bidang PTK
- e. Pengkoodinasani Penyusunan bahan rencana kebutuhan di Bidang PTK
- f. Pengkoordinasian Penyusunan bahan pembinaan PTK
- g. Pengkoodinasian Penyusunan bahan rekomendasi Pemindahan Pendidikan dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
- h. Pengkoodinasian penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di PTK
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan pelindung bagi Tenaga Kependidikan
- j. Pelaksanaan monitoring pembentukan panitia penilaian angka kredit serta meneliti usulan penetapan angka kredit bagi PTK.
- k. Pelaksanaan pemilihan guru, kepek, pengurus sekolah, kepala tata usaha, kepala laboratorium, kepala perpustakaan pada jenjang kependidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK berdedikasi tingkat provinsi.

1.7 Kepala Bidang Kebudayaan

Kepala Bidang Kebudayaan **mempunyai tugas** melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, memfasilitasi urusan pembinaan perfilman, memfasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memfasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia serta tugas pembinaan lainnya

Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
- b. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan perumusan dan koordinas pelaksanaan kebijakan dalam bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum

- provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
- d. pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan dalam hal pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
 - e. pengkoordinasian penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota;
 - f. pengkoordinasian penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota;
 - g. pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/ kota;
 - h. pengkoordinasian penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar provinsi
 - i. pengkoordinasian penyusunan bahan pengelolaan museum provinsi;
 - j. pengkoordinasian penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
 - k. pengkoordinasian penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
 - l. pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas Kabupaten/Kota;
 - m. pelaksanaan monitoring fasilitasi urusan pembinaan perfilman, lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia;
 - n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian.
 - o. mengikuti rapat teknis di bidang kebudayaan sesuai disposisi Kepala Dinas;
 - p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan;
 - q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan Laporan Kinerja Pemerintahan:

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Organisasi
- D. Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

- A. Pencapaian Kinerja Sasaran
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022 - 2027, perlu dilakukan review renstra dikarenakan terjadinya perubahan struktur organisasi dan perubahan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi sejumlah isu-isu strategis di bidang pendidikan. Isu-isu strategis yang teridentifikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Review Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022 - 2027. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya perbedaan kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;
2. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan;
5. Belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dan antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan;
6. Belum efektifnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal utamanya untuk pendidikan anti korupsi dan pelestarian budaya;
7. Belum efektifnya implementasi penerapan kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan;
8. Jumlah angka buta huruf masih tinggi;
9. Belum tercapainya target Nasional APK dan APM di tingkat pendidikan menengah;
10. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;
11. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan pengawas pada pendidikan khusus dan layanan khusus serta Guru Produktif Kejuruan (untuk semua jenjang pendidikan) di Provinsi Bengkulu;

2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu, visi pembangunan Provinsi Bengkulu yang ingin diwujudkan pada periode 2016 - 2021 adalah :

“MEWUJUDKAN BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI”

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi adalah:

a. Bengkulu yang maju

Mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.

b. Bengkulu yang sejahtera

Mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

c. Bengkulu yang bermartabat

Mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan dan berkompetensi, serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah bermajuan dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

d. Bengkulu yang berdaya saing tinggi

Mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha

dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan dimaksud dan pendukung lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menjabarkan serta melaksanakan Visi dan Misi Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Perda nomor 8 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, diuraikan sebagai berikut:

1 Bengkulu yang maju dan sejahtera

1. Masyarakat yang maju dan sejahtera dari sektor pendidikan tercermin pada indikator rendahnya disparitas kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dan pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, memaksimalkan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, memaksimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dan antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal utamanya untuk pendidikan anti korupsi dan pelestarian budaya, memaksimalkan efektifitas implementasi penerapan kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan, penurunan jumlah angka buta huruf, meningkatkan APK dan APM di tingkat pendidikan menengah, meningkatkan sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan, menambah jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Provinsi Bengkulu Pendidikan merupakan bagian penting untuk mewujudkan visi dan misi tersebut karena dengan tercapainya Visi yang dimaksud akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bengkulu yang bermartabat dan berdaya saing

Dengan peningkatan kompetensi siswa dan memiliki keunggulan komperatif siswa lulusan SMA/SMK untuk menghadapi persaingan regional, nasional dan internasional merupakan bagian penting untuk mengurangi angka pengangguran dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas dirumuskan juga beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun ke depan dan peran yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022 – 2027 adalah:

- Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi.
- Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar
- Misi ke 9 : Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan berdaya saing
- Misi ke 14 : Menanggulangi Kemiskinan dan Ketertinggalan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi tata kelola birokrasi dilakukan dengan cara tata kelola pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut:

- Reformasi tata kelola pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dilakukan dalam kaitannya dengan: perencanaan dan peningkatan akuntabilitas publik; perkuatan kelembagaan dan ketata laksanaan; manajemen sumberdaya aparatur pemerintah; manajemen keuangan (pengelolaan APBD) yang baik dan transparan; serta perbaikan sistem pengawasan internal. Misi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik, pemberian insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan, serta transparansi data dan program pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan juga dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir (mindset) aparatur terkait dengan: peningkatan kualitas pelayanan publik; program-program yang menguntungkan daerah dan rakyat; kepercayaan, integritas dan semangat kerja; transparansi dan akuntabilitas; orietasi ke masa depan, dan orientasi pada hasil kerja

Untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat;
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- Peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan);
- Peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja);
- Pemerataan kualifikasi dan penempatan guru;
- Pemantapan kesejahteraan guru.

Meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dengan cara :

- Peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan;
- Melaksanakan 7 nilai demensi kebudayaan;
- Penyediaan tenaga ahli terampil dalam bidang kebudayaan.

3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemendikbud yang mengacu pada RPJMN 2015—2019 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai dengan tahun 2019. Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), Agendadiberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Deklarasi tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage-CSICH*) dan konvensi pelindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah Kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis. Telaahan terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu dan berdaya saing. Kebutuhan tersebut antara lain mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan dan tata kelola.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kemendikbud, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Selanjutnya arah kebijakan Kemendikbud dituangkan kedalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud 2015-2019.

Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019, bahwa tingkat keberhasilan tujuan strategis Kemendikbud diukur dengan sasaran strategis Kemendikbud sejalan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, lebih lanjut arah kebijakan Kemendikbud harus sejalan pula dengan sasaran, arah kebijakan dan strategi agenda pembangunan subbidang pendidikan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kemendikbud disusun untuk mendorong tercapainya sasaran strategis Kemendikbud tersebut, oleh karenanya, arah kebijakan Kemendikbud disusun dengan mendasarkan pada sasaran strategis dengan memperhatikan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019. Arah kebijakan ini selanjutnya dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud.

Kebijakan Kemendikbud yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas tiga subagenda, yaitu:

1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud;
2. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan
3. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi ketiga subagenda tersebut di atas masing-masing diuraikan sebagai berikut.

Subagenda 1: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud

Sasaran dan arah kebijakan dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yaitu sebagai berikut.

a. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan, (a) terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; (b) meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; (c) makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan (d) meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang transparan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (Kemendikbud) yaitu sebagai berikut.

- 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi:
 - (i). penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
 - (ii). penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
 - (iii). pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- 2) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi:
 - (i). penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*;
 - (ii). penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi;
 - (iii). penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan (iv) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
- 3) penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain:
 - (i). pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara;
 - (ii). peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
 - (iii). publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam laman (*website*) masing-masing K/L/D;
 - (iv). penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
 - (v). pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
 - (vi). penerbitan *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (vii) pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional; dan (viii) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

Subagenda 2: Penyempurnan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

a. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan ialah meningkatnya kualitas birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan:

- (a) terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien;
- (b) meningkatnya kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi;
- (c) terimplementasinya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan
- (d) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional diberbagai bidang adalah sebagai berikut:

- 1) restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi
 - (i) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS);
 - (ii) penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan
 - (iii) penguatan sinergis antar lembaga baik dipusat maupun di daerah;
- 2) penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain, (i) penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (ii) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (iii) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (iv) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
- 3) penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain,
 - (i) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
 - (ii) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

- (iii) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- (iv) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
- (v) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
- 4) peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain,
 - (i) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
 - (ii) mendorong inovasi pelayanan publik;
 - (iii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan
 - (iv) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Subagenda 3: Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik Kemendikbud

Sasaran dan arah kebijakan dalam menyempurnakan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik terkait tugas dan fungsi Kemendikbud yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
2. meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
3. meningkatnya implementasi *open government* di Kemendikbud.

b. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

1. membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu:
 - (i). pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - (ii). fasilitasi untuk mendorong satuan kerja Kemendikbud wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - (iii). fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

- (iv). fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
 - (v). penyediaan konten informasi publik berkualitas terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - (vi). penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - (vii). kampanye publik terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam rangka pembangunan revolusi mental;
 - (viii). penguatan manusia bidang komunikasi dan informasi; dan
 - (ix). penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.
2. mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi yaitu
- (i). penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swastadan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; khususnya terkait pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
 - (ii). penguatan literasi media terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - (iii). diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai media.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Terbit dan berlakunya beberapa peraturan perundangan baru – terutama yang memiliki kaitan langsung dengan Bidang Pendidikan seperti Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan nasional tersebut akan bermuara pada perubahan Peraturan Teknis di tingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,

Peraturan Menteri dan seterusnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi langsung pada kebijakan pendidikan di daerah. Dengan demikian Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu harus memperhatikan secara seksama peraturan-peraturan dimaksud dan mengakomodasi substansinya ke dalam rencana strategis;

2. Masih adanya KESEJANGAN KUALITAS manajemen pendidikan di daerah sehingga menyebabkan belum meratanya kualitas pendidikan sesuai dengan standar-standar nasional/internasional;
3. Masih adanya KESENJANGAN AKSESIBILITAS masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga menyebabkan belum meratanya kualitas *output* maupun *outcome* pendidikan;
4. Dunia pendidikan akan dihadapkan pada semakin tingginya intensitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga secara intensif harus melakukan upaya-upaya pengembangan sistem, metode, program dan kompetensi dalam rangka mengantisipasi kebutuhan perkembangan mutakhir yang akseleratif;
5. Perkembangan Dunia Kerja di Indonesia dan di dunia akan “*face to face*” dengan kebutuhan akan kualifikasi output dan outcome pendidikan pengembangan konsep “*link & match*” harus mampu menjembatani “*gap*” antara “*supply dan demand*” ;
6. Heterogenitas desain struktur kelembagaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang menangani bidang pendidikan seringkali menjadi faktor “kesulitan” koordinasi dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal. Hal ini terjadi seringkali disebabkan oleh “pergeseran” fungsi organisasi di masing-masing daerah;
7. Memudarnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional akan berdampak pada tercerabutnya generasi penerus bangsa dari budaya *ibu*, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkannya secara kontekstual;
8. Terwujudnya generasi penerus yang memiliki daya saing dan daya sanding yang tinggi terhadap berbagai kompetisi dalam kehidupan masyarakat baik nasional maupun global, membutuhkan upaya-upaya yang serius, terencana dan berkelanjutan;

Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal S. Parman
 ☎ 21620 – 21623 – 21625 - 20459 Fax (0736) 22117
 Website : dikbud.bengkuluprov.go.id
 Email : dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id BENGKULU – 38227

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Nomor :

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ERI YULIAN HIDAYAT**

NIP : 196707251993031004

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. ROHIDIN MERSYAH**

Jabatan : Gubernur Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 26 Januari 2022

PIHAK KEDUA,
 GUBERNUR BENGKULU

DR. H. ROHIDIN MERSYAH

PIHAK PERTAMA,
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

Drs. ERI YULIAN HIDAYAT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196707251993031004

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan Gubernur
Nomor :
Tanggal :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tujuan: Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13, 63 Tahun
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,95 Tahun
1.1	Sasaran: Meningkatnya kualitas Pendidikan	Rata-Rata Nilai Hasil Ujian Sekolah	42,3
		Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK	100 %
		Angka Melek Huruf	98,11 %
		Angka Putus Sekolah	0,47 %
1.2	Sasaran: Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA	70 %
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA	95 %
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA	80 %
		Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	450 Orang
2	Tujuan/Sasaran: Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,2
3	Tujuan/Sasaran: Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi Sakip	BB

Jumlah Anggaran (APBD) Tahun 2022 : Rp. 893.564.967.742,-

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR BENGKULU



DR. H. ROHIDIN MERSYAH

Bengkulu, 26 Januari 2022
PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU



Drs. ERI YULIAN HIDAYAT

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pencapaian Kinerja Sasaran

Hasil laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022 disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022. Adapun aspek yang diukur adalah penetapan kinerja 2022 serta Indikator kinerja utama (IKU).

Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah cukup baik. Dalam rangka untuk meningkatkan APK, APM dan APS di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PLB.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022					
OPD		: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu			
TAHUN ANGGARAN		: 2022			
NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ PENJELASAN	SUMBER DATA	Penanggung Jawab
1	Tujuan: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Faktor Koreksi X (Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t/ Jumlah Penduduk Usia pada Tahun t)	Dikbud	Dikbud
		Angaka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Dikbud	Dikbud
1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Nilai UN SLTA	Rata-rata nilai UN pada tahun berjalan	Dikbud	Dikbud
		Persentase Kelulusan SLTA	(Jumlah anak SLTA yang Lulus Ujian/ Jumlah anak SLTA yang Ikut Ujian) x 100%	Dikbud	Dikbud
		Angka Melek Huruf	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf / Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas x 100	Dikbud	Dikbud
		Angka Putus Sekolah SLTA	(Jumlah anak yang tidak bersekolah usia 16 -18/ Jumlah anak usia 16 - 18) x 100	Dikbud	Dikbud
1.2	Sasaran: Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA	(Jumlah Penduduk umur 16 – 18 yang sekolah di SLTA/Jumlah Penduduk Usia 16 - 18) x 100	Dikbud	Dikbud
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA	(Jumlah Murid SM/Sederajat/ Jumlah penduduk usia 16 - 18) x 100	Dikbud	Dikbud
		Angka Partisipasi Sekolah SLTA	(Jumlah Penduduk umur 16 – 18 yang sekolah di SLTA/Jumlah Penduduk Usia 16 - 18) x 100	Dikbud	Dikbud
		Angka Anak Tidak Sekolah	Jumlah Anak Tidak Sekolah	Dikbud	Dikbud
2	Tujuan/Sasaran: Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan	Jumlah bobot nilai dimensi pengukuran indeks pembangunan kebudayaan	Dikbud	Dikbud
3	Tujuan/Sasaran: Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi Sakip	Jumlah Bobot nilai komponen penilaian sakip	Dikbud	Dikbud

Tujuan : Meningkatnya Akses dan Kalitas Pendidikan

Harapan Lama Sekolah

Wilayah	2019	2020	2021	2022
Provinsi Bengkulu	13,59	13,61	13,67	13,68

Analisis : Tabel diatas harapan lama sekolah Provinsi Bengkulu ditahun 2019 13,59 ditahun 2020 naik menjadi 13,61,ditahun 2021 naik menjadi 13,67 dan di tahun 2022 naik menjadi 13,68. Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendidikan bukan hanya pemerataan akses Pendidikan, tapi juga pemerataan yang berkualitas. Pemerataan akses Pendidikan diwujudkan dengan memastikan sejumlah program prioritas berjalan dengan baik. Tidak hanya Program prioritas berjalan dengan baik bahkan program strategis harus berdampak baik bagi pencapaian harapan lama sekolah di provinsi Bengkulu.

Rata-rata lama Sekolah

Wilayah	2019	2020	2021	2022
Provinsi Bengkulu	8,73	8,84	8,87	8,91

Analisis : Rata-rata lama Sekolah Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 adalah 8,73 tahun, 2020 naik 8,84 tahun, 2021 menjadi 8,87 tahun, dan 2022 menjadi 8,91 tahun, ini menunjukkan bahwa Pendidikan di Provinsi Bengkulu sudah sangat baik dalam pencapaian rata-rata lama sekolah. Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung dalam pencapaian rata-rata lama sekolah perlu ditingkatkan lagi agar pencapaian tahun berikutnya dalam berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Wilayah	2021	2022
Angka Kelulusan	100	100

Analisis : Pada tahun 2021 dan 2022 untuk pelaksanaan Ujian Nasional dilakukan dalam bentuk asesmen nasional. Asesmen Nasional dihitung berdasrkan tiga aspek diantaranya yaitu: aspek asesmen Kompetensi minimum yang berdasarkan nilai literasi dan numerasi, aspek survei karakter yang diukur melalui pencapaian hasil belajar social-emosional dan aspek survei lingkungan kerja atau lingkungan belajar siswa, aspek ini mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung di lingkungan sekolah.

Sasaran II : Meningkatnya Akses Pendidikan

Wilayah	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Murni (APM)	65,51	65,82	66,08	66,61
Angka Putus Sekolah (APS)	12,50	11,53	11,45	11,37

Analisis : APM (angka partisipasi murni) pada tahun-tahun sebelumnya selalu meningkat ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu selalu berupaya untuk meningkatkan akses Pendidikan baik Sarana dan Prasarana maupun SDM, kita lihat dari data tahun 2019 – 2022 selalu naik walaupun belum signifikan, ditahun berikutnya kita akan focus lagi untuk selalu meningkatkan APM. Sedangkan untuk Angka Putus Sekolah (APS) selalu kita tekankan untuk memperkecil persentase nya agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah teridentifikasi besar harapan kami APS ini akan selalu berkurang di lihat dari Tabel tahun 2019-2022 sudah terus berkurang. Pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Putus Sekolah sesuai dengan penerapan pemendagri No 59 Tahun 2021 terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Tujuan : Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sasaran : Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan

Analisis : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indeks pengukuran dalam pengembangan objek-objek pemajuan kebudayaan. Mengukur IPK ada 7 Nilai dimensi kebudayaan yang harus dicapai untuk mendapatkan IPK yang lebih baik. Tujuh Nilai dimensi kebudayaan tersebut diantaranya yaitu: Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Literasi Budaya dan Dimensi Gender. Di Tahun 2022 IPK Provinsi Bengkulu 56,59% berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

Tujuan : Meningkatnya Tatakelola Kinerja OPD

Sasaran : Meningkatnya Tatakelola OPD

Analisis : Untuk meningkatkan Tata kelola yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melakukan tindak lanjut dari penilaian sapkip oleh inspektorat Provinsi Bengkulu. Pada Review tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memperoleh nilai B, sedangkan pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memperoleh nilai BB.

1. Indikator Kinerja Sasaran : Meningkatnya Pemerataan perluasan akses Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Kegiatan Rp.3.005.794.000	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Kegiatan Rp.2.992.167.876
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5 Jenis Rp. 3.678.173.000	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 5 Jenis Rp. 3.605.391.050
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2 Sekolah Rp. 500.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2 Sekolah Rp. 289.654.286
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5 Lomba Rp. 1.924.000.000	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5 Lomba Rp.496.550.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 34 Orang Rp. 334.610.000	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 34 Orang Rp. 282.572.280
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 109 Sekolah Rp. 1.250.000.000	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 109 Sekolah Rp. 1.197.070.430
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 69 Unit Rp. 14.438.976.000	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 69 Unit Rp. 14.376.348.270
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 10 Ruang Rp. 2.223.691.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 10 Ruang Rp. 2.223.691.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 10 Ruang Rp. 2.180.047.000	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 10 Ruang Rp. 2.180.047.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 16 Ruang Rp. 1.418.637.000	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 16 Ruang Rp. 1.418.637.000

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 5 Ruang Rp.1.492.531.000	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 5 Ruang Rp.1.492.531.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 4 Ruang Rp. 628.514.000	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 4 Ruang Rp. 628.514.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 1 Ruang Rp. 133.579.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 1 Ruang Rp. 133.579.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 22 Ruang Rp.5.551.970.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 17 Ruang Rp.5.551.970.000
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 28 Ruang Rp. 5.506.484.830	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 28 Ruang Rp.5.506.958.599
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Ruang Rp. 576.376.000	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3 Ruang Rp. 576.376.000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 4 Ruang Rp. 2.813.174.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 4 Ruang Rp. 2.813.174.000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 5 Ruang Rp. 2.440.326.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 5 Ruang Rp. 2.440.326.000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 6 Ruang Rp. 2.833.850.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 6 Ruang Rp. 2.833.850.000
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 7 Ruang Rp. 3.575.447.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 7 Ruang Rp. 3.575.447.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10 Ruang Rp.5.272.032.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10 Ruang Rp.5.253.695.955
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10 Ruang, Rp.5.274.537.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 10 Ruang, Rp.5.274.537.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 12 Bulan Rp.83.659.869.883	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 12 Bulan Rp.80.257.677.853

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rekon BOS SMA 142 Sekolah Rp.100.000.000	Terlaksananya Rekon BOS SMA 142 Sekolah Rp.99.771.100

2. Indikator Kinerja Sasaran : Meningkatkan pemerataan perluasan akses Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK)

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Kegiatan Rp.2.761.979.018	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Kegiatan Rp.2.490.130.437
	Pengadaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah 10 Kab/Kota Rp. 9.169.140.700	Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah 10 Kab/Kota Rp. 7.857.947.025
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 4 Sekolah Rp. 773.600.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 4 Sekolah Rp.765.781.956
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5 Kegiatan Rp.529.050.000	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5 Kegiatan Rp.48.632.040
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 5 Kegiatan Rp. 250.000.000	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 5 Kegiatan Rp. 231.714.680
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 60 Sekolah Rp. 182.500.000	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 60 Sekolah Rp. 145.597.450
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 7 Ruang Rp. 3.790.508.400	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 7 Ruang Rp. 3.790.508.400
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 15 Ruang Rp. 7.541.757.408	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 15 Ruang Rp.7.465.100.744
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 6 Ruang Rp. 1.459.348.200	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 6 Ruang Rp.1.459.348.200
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas

		Utilitas Sekolah 13 Ruang, Rp.2.219.511.600	Sekolah 13 Ruang, Rp.2.219.511.600
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 1 Ruang Rp.227.430.900	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 1 Ruang Rp.227.430.900
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 Ruang, Rp.84.233.700	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 Ruang, Rp.84.233.700
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1 Ruang Rp.248.037.300	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1 Ruang Rp.248.037.300
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa 5 Ruang, Rp. 7.032.208.992	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa 5 Ruang, Rp. 6.994.314.675
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Ruang Laboratorium 6 Ruang Rp.2.109.868.200	Pembangunan Ruang Laboratorium 6 Ruang Rp.2.109.868.200
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 6 Ruang Rp.1.582.329.600	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 6 Ruang Rp.1.582.329.600
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2 Ruang, Rp. 698.909.400	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2 Ruang, Rp. 698.909.400
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 80 Paket Rp. 64.033.634.025	Terlaksananya Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 80 Paket Rp.63.661.288.079
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 12 Bulan Rp.52.956.679.171	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 12 Bulan Rp.52.164.173.493

3. Indikator Kinerja Sasaran : Meningkatnya pemerataan perluasan Akses Pendidikan Khusus dan SLB

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 4 Sekolah Rp.1.120.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 4 Sekolah Rp.1.024.471.257
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksanya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Terlaksanya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 5 Kegiatan Rp.197.394.000

		Siswa 5 Kegiatan Rp.200.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus 1 Kegiatan Rp. 100.692.250	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus 1 Kegiatan Rp.90.977.165
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 6 Ruang Rp.940.947.000	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 6 Ruang Rp.938.280.000
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2 Ruang Rp.508.120.000	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2 Ruang Rp.508.120.000
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Ruang, Rp.154.000.000	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Ruang, Rp.154.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10 Ruang Rp.869.240.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 10 Ruang Rp.869.240.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 Ruang Rp. 350.150.000	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 Ruang Rp. 350.150.000
	Pembangunan kantin Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Kantin Sekolah 1 Ruang, 291.550.000	Terlaksananya Pembangunan Kantin Sekolah 1 Ruang, 291.550.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1 Paket Rp. 1.303.040.000	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1 Paket Rp.1.248.623.198
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 12 Bulan Rp. 5.223.640.000	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 12 Bulan Rp. 5.223.640.000

4. Indikator Kinerja Sasaran : Meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
Meningkatn ya Nilai Indeks Pembangun an Kebudayaa n	1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan : Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1 Sertifikasi WBTB Rp.3.600.000.000	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1 Sertifikasi WBTB Rp.3.545.473.887
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2 Event Rp.500.000.000	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 2 Event Rp. 493.652.271
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, 5 Orang Rp.50.000.000	Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, 5 Orang Rp.50.000.000
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terlaksananya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 5 Kegiatan Rp. 75.000.000	Terlaksananya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 5 Kegiatan Rp. 75.000.000
	3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
	Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1 Cagar Budaya Rp.155.000.000	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1 Cagar Budaya Rp.153.075.000
	4. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Kegiatan : Pengelolaan Museum Provinsi		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Sub Kegiatan : Pelindungan, pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Secara terpadu	Terlaksananya Pelindungan, pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Secara terpadu 2075 Koleksi Rp. 600.000.000	Terlaksananya Pelindungan, pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Secara terpadu 2075 Koleksi Rp. 594.300.000
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kapasitas Sumber Daya Permuseuman	Terlaksananya: Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kapasitas Sumber Daya Permuseuman 20 Orang, Rp.1.000.000.000	Terlaksananya: Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kapasitas Sumber Daya Permuseuman 20 Orang, Rp.996.549.019
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 3 Layanan Rp. 1.154.174.349	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 3 Layanan Rp. 1.145.175.000
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 12 Bulan Rp.1.550.000.000	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 12 Bulan Rp.1.399.452.376
	5. UPTD Taman Budaya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 15.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 14.750.000
	Penyediaan bahan Logistik	Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik 12 Bulan, Rp.18.000.000	Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik 12 Bulan, Rp.17.750.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 60.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 55.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 20.336.172

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	dan Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 21.000.000	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp.168.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 50.046.023
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 18.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 17.800.000
	6. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
	Sub Kegiatan : Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pemajuan Objek Kebudayaan 3 Objek Rp.858.235.000	Terlaksananya Pemajuan Objek Kebudayaan 3 Objek Rp.851.400.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesenian 1 Kegiatan Rp.697.630.000	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesenian 1 Kegiatan Rp.583.400.000
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya 1 Kegiatan Rp.473.865.000	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya 1 Kegiatan Rp.444.929.577

5. Indikator Kinerja Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola OPD

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Nilai Sakip	2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Sebanyak 10 Dokumen Rp.310.000.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Sebanyak 10 Dokumen Rp.297.547.668

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinas dan konsultasi, peningkatan operator dapodik sebanyak 251 0orang Rp.676.164.590	Terlaksananya Koordinas dan konsultasi, peningkatan operator dapodik sebanyak 251 0orang Rp.654.439.939
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Rp.530.324.814.311	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Rp.520.104.262.824
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlakananya verifikasi dana hibah 20 Dokumen Rp.3.020.000.000	Terlakananya verifikasi dana hibah 20 Dokumen Rp.3.016.750.000
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Aset 10 Kab/Kota Rp.58.000.000	Terlaksananya Pengamanan Aset 10 Kab/Kota Rp.55.860.000
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai 10 Kab./Kota Rp.250.000.000	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai 10 Kab./Kota Rp.231.637.230
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor 12 bulan Rp.35.500.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor 12 bulan Rp.35.300.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp.29.500.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp.29.400.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.330.000.000	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.319.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan cetakan dan penggandaan kantor 12 bulan Rp.170.000.000	Terlaksananya penyediaan cetakan dan penggandaan kantor 12 bulan Rp.168.900.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyediaan bahan Bacaan kantor 12 bulan Rp.38.400.000	Terlaksananya penyediaan bahan Bacaan kantor 12 bulan Rp.38.250.000

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasinya 12 Bulan Rp.370.000.000	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasinya 12 Bulan Rp.363.633.049
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kendaraan dinas 16 Unit Rp.600.000.000	Terlaksananya Kendaraan dinas 16 Unit Rp.544.300.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan mesin kantor 1 Paket Rp.39.000.000	Terlaksananya Peralatan dan mesin kantor 1 Paket Rp.38.968.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa surat menyurat 12 Bulan Rp.2.000.000	Terlaksananya Jasa surat menyurat 12 Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 350.000.000	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 333.176.228
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.55.279.999.300	Terlaksananya Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.52.390.674.471
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp.222.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 220.199.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan Rp.24.250.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan Rp.22.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Paket Rp. 635.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Paket Rp. 633.770.049
	3. UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik 12 Bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik 12 Bulan Rp.4.950.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyedian alat rumah tangga dan	Terlaksananya Penyedian alat rumah tangga dan

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
		kebersihan 12 bulan Rp.8.000.000	kebersihan 12 bulan Rp.8.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.14.000.000	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.13.750.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan cetak dan Penggandaan 12 bulan Rp.15.000.000	Terlaksananya Penyediaan cetak dan Penggandaan 12 bulan Rp.14.900.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.4.000.000	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.3.905.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi 12 bulan Rp.40.000.000	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi 12 bulan Rp.39.250.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas 12 bulan Rp.14.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas 12 bulan Rp.13.800.000
Meningkatn ya Nilai Sakip	4. UPTD Pengembangan Pendidikan Kejuruan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik 12 Bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik 12 Bulan Rp.4.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.15.500.000	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.15.250.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan cetak dan Penggandaan 12 bulan Rp.17.500.000	Terlaksananya Penyediaan cetak dan Penggandaan 12 bulan Rp.17.250.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.4.000.000	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.3.195.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi 12 bulan Rp.40.000.000	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi 12 bulan Rp.39.250.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya pembayaran listrik dan internet 12 bulan Rp.9.000.000	Terlaksanya pembayaran listrik dan internet 12 bulan Rp.6.765.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas 12 bulan Rp.14.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas 12 bulan Rp.13.700.000
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
	Sub Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan Asesor Kejuruan 20 Orang Rp. 125.000.000	Terlaksananya Pengembangan Asesor Kejuruan 20 Orang Rp. 123.170.768
	5. Kantor Cabang Dinas Wilayah I Bengkulu Utara PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 8.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 7.950.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 9.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 8.950.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.16.000.000	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.15.800.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 20.000.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 19.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.4.836.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 46.795.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 46.250.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 10.205.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 4.877.625
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.20.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.20.000.000

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 15.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 14.800.000
	6. Kantor Cabang Dinas Wilayah II Rejang Lebong PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 9.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 8.950.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 9.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.18.000.000	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.17.900.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 21.500.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 21.400.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya penyediaan surat kabar 12 bulan Rp.4.936.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 49.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 48.450.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 12.500.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 11.402.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 15.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 14.800.000
	7. Kantor Cabang Dinas Wilayah III Bengkulu Selatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 7.008.400	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 6.950.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 8.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 7.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.17.500.000	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.17.400.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 20.000.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 19.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.4.836.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 48.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 47.000.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 12.500.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 9.724.438
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 12.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 11.900.000
	8. Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Mukomuko PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 8.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 7.900.000

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 9.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.18.500.000	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.18.250.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 21.500.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 21.400.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.4.836.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 55.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 53.000.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 7.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 6.577.200
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 15.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 14.800.000
	9. Kantor Cabang Dinas Wilayah V Lebong PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 5.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 4.950.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 7.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 6.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.10.000.000	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.9.900.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 15.000.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 14.900.000

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.4.836.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 33.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 33.000.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 9.940.100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.20.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.20.000.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 15.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 14.500.000
	10. Kantor Cabang Dinas Wilayah VI Seluma PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 7.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 7.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 8.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 7.950.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.17.500.000	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.17.400.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 18.800.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 18.700.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.3.600.000	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.3.550.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
		SKPD 12 Bulan Rp. 34.500.000	SKPD 12 Bulan Rp. 34.000.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 11.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 9.476.669
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 19.600.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 19.500.000
	11. Kantor Cabang Dinas Wilayah VII Kepahiang PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 9.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 8.900.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 9.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.18.000.000	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Rp.17.800.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 20.000.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 19.750.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 37.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 36.750.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 11.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp. 10.454.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan :	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 15.000.000	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp. 14.600.000
	12.Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII Bengkulu Tengah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 6.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 5.900.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 8.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 7.900.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.13.000.000	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.12.800.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 17.000.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 16.900.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.4.836.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 30.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 29.800.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp.11.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp.10.944.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.20.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan Rp.20.000.000
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp.10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp.9.900.000

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
	13. Kantor Cabang Dinas Wilayah IX Kaur PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 10.000.000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan Rp. 9.750.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 12.000.000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan, Rp. 11.800.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.18.000.000	Terlaksananya penyedian bahan logistik kantor 12 bulan Rp.17.800.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 22.000.000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan Rp. 21.750.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.5.000.000	Terlaksananya penyedian surat kabar 12 bulan Rp.4.836.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 56.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan Rp. 54.240.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp.11.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan Rp.5.331.625
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp.16.000.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Bulan Rp.15.900.000

Analisis : Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran 1 - 8 tergambar jelas kegiatan yang telah terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan target yang diinginkan sehingga program,, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dan tercapai.

B. Akuntabilitas Keuangan

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022 disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang di tetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun 2022. Adapun aspek yang di ukur adalah penetapan kinerja 2022 serta Indikator kinerja utama (IKU).

Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memuaskan. Dalam rangka untuk meningkatkan APK, APM dan APS di bidang Pendidikan SMA, SMK dan PLB serta peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Nilai tata Kelola Pemerintahan.

C. Realisasi Anggaran

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Nama Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Pengeluaran d	Persentase (%)	
		s.d bln ini	Keu.	Fisik
Nama Program / Kegiatan				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	592.764.628.201	578.954.268.958	97,67	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	986.164.590	951.987.607	96,53	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	310.000.000	297.547.668	95,98	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	676.164.590	654.439.939	96,79	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	533.344.814.311	523.121.012.824	98,08	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	530.324.814.311	520.104.262.824	98,07	100,00
Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.020.000.000	3.016.750.000	99,89	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.000.000	55.860.000	96,31	100,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	58.000.000	55.860.000	96,31	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	231.637.230	92,65	100,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	250.000.000	231.637.230	92,65	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	973.400.000	954.983.049	98,11	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	35.500.000	35.300.000	99,44	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.500.000	29.400.000	99,66	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.000.000	319.500.000	96,82	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	170.000.000	168.900.000	99,35	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	38.400.000	38.250.000	99,61	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.000.000	363.633.049	98,28	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	639.000.000	38.968.000	6,10	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	600.000.000	544.300.000	90,72	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.000.000	38.968.000	99,92	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.631.999.300	52.723.850.699	94,77	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	333.176.228	95,19	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.279.999.300	52.390.674.471	94,77	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881.250.000	875.969.549	99,40	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.000.000	220.199.500	99,19	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.250.000	22.000.000	90,72	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	635.000.000	633.770.049	99,81	100,00

b. Program Pengelolaan Pendidikan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	327.811.771.684	322.158.115.038	98,28	99,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	154.497.774.220	150.583.843.375	97,47	99,96
Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	131.477.907	12.760.551	9,71	50,00
Penambahan Ruang kelas Baru	3.535.788.000	3.535.788.000	100,00	100,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5.272.032.000	5.253.695.955	99,65	100,00
Pembangunan Ruang Labolatorium Biologi	2.833.850.000	2.833.850.000	100,00	100,00
Pembangunan Ruang Labolatorium Fisika	2.440.326.000	2.440.326.000	100,00	100,00
Pembangunan Ruang Labolatorium Kimia	2.813.174.000	2.813.174.000	100,00	100,00
Pembangunan Ruang Labolatorium Komputer	3.575.447.000	3.575.447.000	100,00	100,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.274.537.000	5.274.537.000	100,00	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.005.794.000	2.992.167.876	99,55	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.438.976.000	14.376.348.270	99,57	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Kepala Sekolah/TU	5.551.970.000	5.551.970.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Biologi	1.418.637.000	1.418.637.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Fisika	2.180.047.000	2.180.047.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Kimia	2.223.691.000	2.223.691.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Komputer	628.514.000	628.514.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Labolatorium Bahasa	133.579.000	133.579.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	576.376.000	576.376.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	1.492.531.000	1.492.531.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.506.484.830	5.505.958.599	99,99	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.678.173.000	3.605.391.050	98,02	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	500.000.000	496.550.000	99,31	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	1.941.889.600	1.825.412.411	94,00	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMA	334.610.000	282.572.280	84,45	100,00
Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.250.000.000	1.197.070.430	95,77	100,00
Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	83.659.869.883	80.257.677.853	95,93	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100.000.000	99.771.100	99,77	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	159.686.362.214	158.010.170.372	98,95	100,00
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.960.635.600	1.955.647.797	99,75	100,00
Penambahan Ruang Praktik Siswa	7.032.208.992	6.994.314.675	99,46	100,00
Pembangunan Ruang Labolatorium	2.109.868.200	2.109.868.200	100,00	100,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.582.329.600	1.582.329.600	100,00	100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	698.909.400	698.909.400	100,00	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.761.979.018	2.490.130.437	90,16	100,00
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	7.541.757.408	7.465.100.744	98,98	100,00
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.459.348.200	1.459.348.200	100,00	100,00
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	3.790.508.400	3.790.508.400	100,00	100,00
Rehabilitasi Ruang Labolatorium	227.430.900	227.430.900	100,00	100,00
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	84.233.700	84.233.700	100,00	100,00
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah	248.037.300	248.037.300	100,00	100,00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.219.511.600	2.219.511.600	100,00	100,00
Pengadaan Mebel Sekolah	9.169.140.700	9.155.750.300	99,85	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	64.033.634.025	63.661.288.079	99,42	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	773.600.000	765.781.956	98,99	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	529.050.000	485.632.040	91,79	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	250.000.000	231.714.680	92,69	100,00
Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah KEJURUAN	182.500.000	145.597.450	79,78	100,00
Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Kejuruaan	52.956.679.171	52.164.173.493	98,50	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	75.000.000	74.861.421	99,82	100,00
Pengelolaan Pendidikan Khusus	13.627.635.250	13.564.101.291	99,53	100,00
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.511.256.000	2.496.760.500	99,42	100,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	869.240.000	869.240.000	100,00	100,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	350.150.000	350.150.000	100,00	100,00
Pembangunan Kantin Sekolah	291.550.000	291.550.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	940.947.000	938.280.000	99,72	100,00
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	508.120.000	508.120.000	100,00	100,00
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	154.000.000	154.000.000	100,00	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.303.040.000	1.248.623.198	95,82	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	1.120.000.000	1.024.471.257	91,47	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	200.000.000	197.394.000	98,70	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	100.692.250	90.977.165	90,35	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	5.223.640.000	5.339.635.616	102,22	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	55.000.000	54.899.555	99,82	100,00

b. Program Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	8.684.174.349	8.449.797.253	97,30	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.100.000.000	4.039.126.158	98,52	100,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.100.000.000	4.039.126.158	98,52	100,00
Perindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	3.600.000.000	3.545.473.887	98,49	100,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500.000.000	493.652.271	98,73	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	125.000.000	122.119.700	97,70	100,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	122.119.700	97,70	100,00
Peningkatan Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.000.000	49.680.000	99,36	100,00
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	75.000.000	72.439.700	96,59	100,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	155.000.000	153.075.000	98,76	100,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	155.000.000	153.075.000	98,76	100,00
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	155.000.000	153.075.000	98,76	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.304.174.349	4.135.476.395	96,08	100,00
Pengelolaan Museum Provinsi	4.304.174.349	4.135.476.395	96,08	100,00
Pelindungan, pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	600.000.000	594.300.000	99,05	100,00
Pembinaan dan peningkatan Mutu Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1.000.000.000	996.549.019	99,65	100,00
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1.154.174.349	1.145.175.000	99,22	100,00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1.550.000.000	1.399.452.376	90,29	100,00

c. Cabang Dinas

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu	1.200.000.000	1.158.219.657	96,52	98,35
Kantor Cabang Dinas Wilayah I Bengkulu Utara	150.000.000	143.263.625	95,51	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.000.000	143.263.625	95,51	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.795.000	103.586.000	98,85	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.950.000	99,38	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	8.950.000	99,44	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000	15.800.000	98,75	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.800.000	99,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	4.836.000	96,72	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.795.000	46.250.000	98,84	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.205.000	24.877.625	82,36	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.205.000	4.877.625	47,80	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	14.800.000	98,67	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.800.000	98,67	100,00
Kantor Cabang Dinas Wilayah II Rejang Lebong	140.000.000	137.738.000	98,38	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	140.000.000	137.738.000	98,38	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.500.000	111.536.000	99,14	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.950.000	99,44	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.900.000	99,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	17.900.000	99,44	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000	21.400.000	99,53	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	4.936.000	98,72	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.000.000	48.450.000	98,88	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.500.000	11.402.000	91,22	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000	11.402.000	91,22	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	14.800.000	98,67	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.800.000	98,67	100,00
Kantor Cabang Dinas Wilayah III Bengkulu Selatan	140.000.000	125.510.438	89,65	85,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	140.000.000	125.510.438	89,65	85,19
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.500.000	103.886.000	98,47	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.950.000	99,29	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.900.000	98,75	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.400.000	99,43	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.800.000	99,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	4.836.000	96,72	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000	47.000.000	97,92	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.000	9.724.438	43,22	55,56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000	9.724.438	77,80	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	11.900.000	99,17	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.000.000	11.900.000	99,17	100,00

Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Mukomuko	140.000.000	136.663.200	97,62	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	140.000.000	136.663.200	97,62	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.000.000	115.286.000	97,70	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.900.000	98,75	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.900.000	99,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.500.000	18.250.000	98,65	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000	21.400.000	99,53	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	4.836.000	96,72	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	53.000.000	96,36	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	6.577.200	93,96	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	6.577.200	93,96	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	14.800.000	98,67	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.800.000	98,67	100,00
Kantor Cabang Dinas Wilayah V Lebong	120.000.000	118.926.100	99,11	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000	118.926.100	99,11	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.000.000	74.486.000	99,31	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.950.000	99,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	6.900.000	98,57	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.900.000	99,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.900.000	99,33	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	4.836.000	96,72	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000	33.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	29.940.100	99,80	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	9.940.100	99,40	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	14.500.000	96,67	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.500.000	96,67	100,00
Kantor Cabang Dinas Wilayah VI Seluma	120.000.000	117.576.669	97,98	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000	117.576.669	97,98	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.400.000	88.600.000	99,11	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.950.000	99,38	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.400.000	99,43	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.800.000	18.700.000	99,47	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.600.000	3.550.000	98,61	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.500.000	34.000.000	98,55	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000	9.476.669	86,15	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	9.476.669	86,15	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.600.000	19.500.000	99,49	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.600.000	19.500.000	99,49	100,00
Kantor Cabang Dinas Wilayah VII Kepahiang	120.000.000	118.154.000	98,46	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000	118.154.000	98,46	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.000.000	93.100.000	99,04	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.900.000	98,89	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.900.000	99,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	17.800.000	98,89	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	19.750.000	98,75	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.000.000	36.750.000	99,32	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000	10.454.000	95,04	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	10.454.000	95,04	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	14.600.000	97,33	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.600.000	97,33	100,00
Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII Bengkulu Tengah	120.000.000	118.980.000	99,15	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000	118.980.000	99,15	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.000.000	78.136.000	98,91	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.900.000	98,33	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.900.000	98,75	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	12.800.000	98,46	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	16.900.000	99,41	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	4.836.000	96,72	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.800.000	99,33	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.000.000	30.944.000	99,82	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	10.944.000	99,49	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	9.900.000	99,00	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	9.900.000	99,00	100,00

Kantor Cabang Dinas Wilayah IX Kaur	150.000.000	141.407.625	94,27	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.000.000	141.407.625	94,27	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.000.000	120.176.000	97,70	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.750.000	97,50	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000	11.800.000	98,33	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	17.800.000	98,89	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	21.750.000	98,86	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	4.836.000	96,72	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000	54.240.000	96,86	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000	5.331.625	48,47	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	5.331.625	48,47	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000	15.900.000	99,38	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	15.900.000	99,38	100,00

d. UPTD

UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000	98.555.000	98,56	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.000.000	98.555.000	98,56	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.000.000	84.755.000	98,55	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.950.000	99,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000	13.750.000	98,21	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.900.000	99,33	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.000.000	3.905.000	97,63	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	39.250.000	98,13	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000	13.800.000	98,57	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	13.800.000	98,57	100,00
UPTD Pengembangan Pendidikan Kejuruan	240.000.000	230.544.508	96,06	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	240.000.000	230.544.508	96,06	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.000.000	86.908.740	94,47	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.900.000	98,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.500.000	15.250.000	98,39	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000	17.250.000	98,57	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.000.000	3.195.000	79,88	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	46.313.740	92,63	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000	6.765.000	75,17	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	6.765.000	75,17	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000	13.700.000	97,86	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	13.700.000	97,86	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	125.000.000	123.170.768	98,54	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	125.000.000	123.170.768	98,54	100,00
UPTD Taman Budaya	2.739.730.000	2.083.161.772	81,37	95,63
UPTD Taman Budaya	292.000.000	185.682.195	63,59	91,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	292.000.000	185.682.195	63,59	91,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.000.000	100.086.172	94,42	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.750.000	98,33	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	55.000.000	91,67	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.000.000	20.336.172	96,84	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.000.000	50.046.023	29,79	65,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000	50.046.023	29,79	65,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	17.800.000	98,89	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000	17.800.000	98,89	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.447.730.000	1.897.479.577	99,15	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.000.000	17.750.000	98,61	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	17.750.000	98,61	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.429.730.000	2.275.029.287	93,63	100,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.029.730.000	1.879.729.577	100,00	100,00
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	858.235.000	851.400.000	99,20	100,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Taman Budaya	697.630.000	583.400.000	83,63	100,00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	473.865.000	444.929.577	93,89	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	400.000.000	395.299.710	98,82	100,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	395.299.710	98,82	100,00
Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	400.000.000	395.299.710	98,82	100,00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dengan Gubernur Bengkulu.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian–capaian indikator kinerja tersebut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus mendukung terwujudnya misi yang tercantum dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2016– 2022. Walaupun demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tidak akan berpuas diri dengan keberhasilan tersebut, karena di masa yang akan datang masih banyak tantangan yang akan dihadapi.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik.

B. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LAKIP Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan dana pendidikan untuk mewujudkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2022.